

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI DESA PINAMORONGAN KECAMATAN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**NOVLIN SANTIKA RUTH KUMAJAS
GUSTAAF TAMPI
VERY LONDA**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the performance of the Village Consultative Body in Pinamorongan Village, Tarerean District, South Minahasa Regency. This study used qualitative research methods. Based on the problems encountered, in carrying out its duties and responsibilities, the Village Consultative Body in Pinamorongan Village has not been optimal in carrying out supervision of village administration in Pinamorongan village. And based on the results of the research, the members of the Village Consultative Body in Pinamorongan Village still lack self-awareness of their duties and responsibilities and there are also some members who are inactive and lack a positive response from the village community.

Keywords: Implementation , Village Consultative Body, Village Government

PENDAHULUAN

Badan Permustawaratann Desa atau BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi, BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Oleh karna itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dandipilih secara demokratis. Disamping menjalankan

fungsinya sebagai tempat menghubungkan, antara lain kepala desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik yang selaras dengan kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permasyarakatan Desa adaah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik desa yang dikelola oleh kepala desa selaku pemerintah desa.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan belum berjalan secara Optimal Karna masih ada Beberapa Fungsi Badan Permasyarakatan Desa yang Belum berjalan dengan Baik, dalam halnya Badan Permasyarakatan Desa di Desa Pinamorongan belum optimal dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan desa di Desa Pinamorongan .

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Budiyarto Usman, Salmin Dengo, Very Y. Londa (2016) dengan judul Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa Sebagaimana disebutkan dalam UU.No.6 Tahun 2014, bahwa BPD mempunyai fungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa (pasal 55), dan menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (pasal 61).

Penelitian ke dua yang di lakukan oleh Enggelion Kansige, Masje Silija Pangkey, Jericho Denga Pombengi (2016) dengan judul penelitian Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. Dalam penelitian kali ini mengemukakan bahwa Dalam peraturan Pemerintah NO 72 tahun 2005 di tegaskan bahwa pembagunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota atau pihak ke tiga dengan mengikutsertakan pemerintah desa dan BPD.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nofitri Rading, Florence Daicy Lengkong, Deysi Tampongangoy (2018) dengan judul penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa Menurut pasal 61 Undang- Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa badan permusyawaratan desa berhak; a). Mengawasi dan meminta keterangan tentang

penyelenggaraan pemerintahan desa kepala pemerintah desa; b). Menyatakan atau asas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; c). Mendapatkan biaya oprasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan belanja desa.

KONSEP FUNGSI MANAJEMEN

Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya Principles of Management yaitu "Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya". Dari definisi Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:

a) Planning (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 2011) mengemukakan tentang Planning sebagai berikut, yaitu "Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necesarry to accieeve desired result".

"...Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan."

b) Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 2011) mengemukakan

tentang organizing sebagai berikut, yaitu "Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority delegated to each respective activity.

c) Actuating (Pelaksanaan /Penggerakan)

Menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 2011) mengatakan bahwa Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts. "...Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tools of management. Hal ini sudah barang tentu merupakan mismanagement.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan

juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program. (Sukarna, 2011). Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu:

1. Leadership (Kepemimpinan)
2. Attitude and morale (Sikap dan moril)
3. Communication (Tatahubungan)
4. Incentive (Perangsang)
5. Supervision (Supervisi)
6. Discipline (Disiplin).

d) Controlling (Pengawasan)

Control mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk melengkapi pengertian diatas, menurut George R. Terry (Sukarna, 2011) mengemukakan bahwa Controlling, yaitu: Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary

applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard. "...Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). Terry (Sukarna, 2011), mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

1. Determining the standard or basis for control (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
2. Measuring the performance (ukuran pelaksanaan)
3. Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, it any (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
4. Correcting the deviation by means of remedial action (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

Hakikat dari fungsi manajemen dari Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan, ada baiknya rumuskan dulu tujuan yang akan dicapai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk menganalisa dan menggambarkan secara detail tentang indikator-indikator dari variabel penelitian yaitu variabel kinerja, untuk metoda analisa data yang dipakai adalah analisa kualitatif yaitu menalarkan variabel yang diteliti secara kualitatif berupa pengeluaran-pengeluaran atau informasi yang didapat dari informan kualitatif tanpa memakai statistika.

Adapun jenis penelitian pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk menganalisa dan menggambarkan secara detail tentang indikator-indikator dari variabel penelitian yaitu variabel kinerja, untuk metoda analisa data yang dipakai adalah analisa kualitatif yaitu menalarkan variabel yang diteliti secara kualitatif berupa pengeluaran-pengeluaran atau informasi yang didapat dari informan kualitatif tanpa memakai statistika.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung yang bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti berada diluar sistem yang di amati.

2. Wawancara

Wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab secara tatap muka, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tersebut. Dalam wawancara, maka peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan

wawancara,peneliti meyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan,dan mencatat apa yang di kemukakan oleh informan,oleh karena itu jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis wawancara terstruktur (Esterberg dalam Sugioyono,2007)

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiono, 2007). Hasil peneletian dari obsevasi atau wawancara akan lebih kredible kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Planning (Perencanaan)

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan mempunyai program tersendiri untuk masyarakat desa pinamorongan yaitu Kamtibmas, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan juga mengambil bagian dalam perencanaan pembangunan desa, dalam membahas dan menyikapi rancangan peraturan desa bersama kepala desa belum memiliki faktor penghambat.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan masih kurang aktif dalam tugas dan tanggung jawabnya, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan adanya Badan Permusyawaatan Desa di Desa Pinamorongan.

3. Actuanting

(Pelaksanaan/Penggerakan)

Melalui beberapa pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya

sebenarnya sudah dilakukan dengan baik tapi masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terealisasi dan masih ada masyarakat yang tidak bisa mengaspirasikan suaranya karna Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan masih kurang aktif.

4. Controlling (Pengawasan)

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan melakukan Tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pengawasan kinerja kepala desa sudah berjalan dengan baik pada hukum tua sebelumnya,namun ada masih ada juga anggota yang belum melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan oleh bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Planning (Perencanan), Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan dalam halnya Perencanaan belum berjalan dengan baik dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan juga Dalam Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa belum memiliki hambatan.

2. Organizing (Perorganisasian), Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan aktif memberidi diri dalam progam pemerintah desa walaupun sarana dan prasarana belum menunjang

3. Actuanting

(Pelaksanaan/Penggerakan), Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan dalam pemerintahan desa masih lemah. Bahkan boleh dikatakan dalam pelaksanaan dalam

sistem pemerintahan desa di Desa Pinamorongan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam menyerap dan menampung segala aspirasi yang berkembang didalam masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukannya namun masih banyak aspirasi-aspirasi masyarakat desa yang belum terealisasi

4. Controlling (Pengawasan), Badan Permusyawaratan Desa di Desa pinamorongan telah melakukan dengan cukup baik dalam hal pengawasan kinerja kepala desa dan BPD di Desa Pinamorongan juga mengikut serta dalam kegiatan pemerintah desa.

SARAN

1. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan dapat bekerja sama dengan kepala desa serta mengajak masyarakat untuk

berpartisipasi dalam perbaikan-perbaikan serta melakukan pembangunan-pembangunan demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa yang mandiri

2. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan Harus lebih aktif lagi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan dapat lebih mensosialisasikan segala sesuatu yang menyangkut keadaan desa sehingga masyarakat mengetahui perkembangan desa dan bisa menampung aspirasi masyarakat desa dengan baik.
4. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pinamorongan lebih berperan aktif dalam melakukan tugas pengawasan kinerja kepala desa.

Desa di kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan. Unsrat

DAFTAR PUSTAKA

- Kansige, E., Pangkey, S., & Pombengi, J. (2016). *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Administrasi Publik: UNSRAT.
- Katengar, S., Dengo, S., & Sondakh, T. (2015). *Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan (Suatu Studi di Permusyawaratan*
- Usman , B., Dengo, S., & Londa, V. (2016). *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam*
- Meleong, L. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja. ROSDA KARYA: Bandung.
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. MANDAR MAJU: Bandung.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. ALFA BETA: Bandung
- Terry, R., George, & Leslie, W. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. BUMI ARKASA: Jakarta.
- Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Galela. Unsrat..*